

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TES KEMAMPUAN AGAMA
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA { PPDB-SMP} DI KOTA BLITAR**

Mohammad Kanzul Fathon¹
kanzulfathon2@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Blitar yang menerapkan ketentuan melaksanakan tes kemampuan agama bagi seluruh peserta didik kelas VI yang akan melanjutkan ke jenjang SMP di wilayah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar memandang perlu untuk mengikutsertakan tes kemampuan agama untuk melengkapi kualitas persyaratan pada proses PPDB SMP karena dimaksudkan sebagai sarana pembentuk jati diri manusia Indonesia yang berakhlak mulia serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian ini merupakan penelitian yang didesain dalam bentuk penelitian evaluasi implementasi dalam bentuk deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tes kemampuan agama dalam rangka melengkapi persyaratan PPDB SMP di Kota Blitar. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada key informant yang berkaitan dengan Kebijakan Tes kemampuan agama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Sekolah Dasar sehingga diperoleh data yang akurat dan konkret. Hasil penelitian, menunjukkan proses pelaksanaan kebijakan tes kemampuan agama pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Blitar ditinjau dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, kemampuan agama, Sekolah Menengah Pertama

¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

Abstract

The writing of this article is motivated by the policy of the Blitar City government that implements a policy of carrying out a religious ability test for all sixth grade students who will continue to junior high school in the Blitar City area must take a religious ability test. The Blitar City Government considers it necessary to include a religious ability test to complete the quality requirements in the SMP PPDB process because it is considered a means of forming Indonesian human identity who has noble character and has faith and devotion to God Almighty. Blitar. The data in this study were obtained by collecting data through documentation and in-depth interviews with key informants related to the religious ability test policy that carried out by the Blitar City Education Office and Elementary Schools so that accurate and concrete data is obtained. The results of the study, show the process of implementing the policy of religious proficiency testing at the elementary school level in Blitar City in terms of resources, communication, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: *Policy Implementation, Religious Ability, Junior High School*

A. Pendahuluan

Pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya, tidaklah sekedar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sekaligus sebagai proses penanaman dan penumbuhan (*transfer of value*). Secara konseptual dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan islam adalah menjadikan manusia bertaqwa, yaitu manusia dapat mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan banyak peristiwa miris terjadi yang melibatkan para anak/remaja usia sekolah mulai dari kasus amoral,criminal, perundungan dan lain-lain.²

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Memperhatikan kondisi perkembangan dunia pendidikan kita sepertinya belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, fenomena itu terindikasi dengan ditandai dari beberapa hal yang dapat dijadikan parameter dasar dalam memberikan penilaian antara lain ; rendahnya mutu lulusan, penyelesaian

² Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hal. 43

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

problematika pendidikan yang tidak sampai tuntas, atau cenderung tambal sulam. Akibatnya, sering kali hasil Pendidikan mengecewakan masyarakat. Untuk merealisasikan harapan dan tujuan pendidikan khususnya Islam tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal ini dapat dilihat pada fenomena yang ada, sebagaimana terjadi beberapa peristiwa memilukan di tanah air yang pelakunya anak-anak usia sekolah. Kejadian tawuran antarpelajar yang menewaskan remaja { NR} berusia 16 tahun di Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, bermula saat korban dan rekan-rekannya rampung mengikuti ujian sekolah. Tawuran yang menewaskan pelajar berinisial NR itu terjadi pada Senin (28/3/2022). Polisi telah menetapkan tiga tersangka terkait tawuran tersebut, yakni MA, SG, dan S.³ Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Luwu berinisial DI (14) menjadi korban pemerkosaan empat remaja. [Kepolisian](#) Resor Luwu telah menangkap empat pelaku pemerkosaan.⁴

Pada 5 Maret 2020, sebuah pembunuhan oleh remaja berusia 15 tahun terjadi di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korbannya adalah tetangganya sendiri yang masih berumur 5 tahun. Pembunuhan ini tergolong sadis karena pelaku, berinisial NF, mengaku melakukan aksinya secara sadar. Ia membunuh APA yang sedang bermain ke rumahnya dengan cara menenggelamkannya ke bak mandi, dicekik, dan kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam lemari di kamarnya. NF juga mengaku membunuh korban karena terinspirasi dari film horor yang sering ditontonnya⁵ Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu, Ajun Komisaris Jon Paerunan mengatakan empat pelaku kasus rudapaksa terhadap DI yang telah diamankan yakni RI (17), AR (19), AL (16), dan RA (21). Kini empat pelaku tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaana. Kasus remaja putri hamil diluar nikah yang terus meningkat, Seperti yang terjadi di Kota Mojokerto jumlah siswi [hamil](#) yang berdampak putus Sekolah jumlahnya terus meningkat. Dari data yang ada, tahun 2016 kemarin, mencapai 32 anak, ini naik dibandingkan tahu 2015 yang hanya 12 anak. Meningkatnya kasus siswi hamil ini, dinilai kurangnya perhatian orang tua pada anak anaknya saat di lingkungan

³ Kompas.com Berjudul "Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun 2022, diunduh pada tanggal 2 September 2022

⁴ Merdeka .com, Berjudul "Pelajar SMP Jadi Korban Pemerkosaan 4 Remaja di Luwu", diunduh pada tanggal 3 September 2022

⁵ di [Kompas.com](#) dengan judul "Kisah Pulu di Balik Aksi Remaja Bunuh Balita, Pelaku adalah Korban Pemerkosaan",

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

keluarga⁶. Belum lagi tawuran antar pelajar seperti yang terjadi di Polrestro Depok dan Polsek Sukmajaya mengamankan enam pelajar yang diduga hendak tawuran di Jalan Ciliwung, Kecamatan Sukmajaya. Dari enam pelajar itu ditemukan satu perempuan kedapatan membawa 6 buah celurit.⁷Kaus-kasus menambah daftar Panjang kenakalan yang terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dari beberapa catatan kasus kriminalitas di atas menunjukkan masih adanya kontradiksi antara idealitas dan realitas yang ada di masyarakat. Permasalahan besar yang dialami bangsa ini yang ditandai dengan krisis etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan konflik berkepanjangan Peristiwa tawuran dan tindakan kriminalitas lainn yang dilakukan para pelajar serta maraknya pergulan bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa merupakan pekerjaan rumah yang cukup menyita perhatian semua kalangan khususnya di dunia Pendidikan.

Persoalan - persoalan sosial kemasyarakatan termasuk didalam dunia Pendidikan tersebut di atas sudah barang tentu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat, namun diperlukan campur tangan penanganan oleh Pemerintah melalui kebijakan publik. Berangkat dari pemikiran ini Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan kebijakan Tes Kemampuan Agama sebagai upaya mendorong, memotivasi peserta didik agar lebih mendalami ajaran agamanya. Kebijakan tersebut dimulai sejak tahun 2012 dengan terbitnya Perwali nomor 8 tahun 2012 dan sudah mengalami beberapakali perubahan, yakni Perwali nomor 14 tahun 2017 dan Perwali nomor 10 tahun 2018.

Prosedur yang digunakan dalam riset ini merupakan metode kualitatif. Nana Syaodih Sukmadinata, menerangkan riset kualitatif(*qualitative research*) yaitu suatu studi yang diperuntukan buat mendiskripsikan serta menganalisis fenomena, kejadian, kegiatan sosial, perilaku, keyakinan, anggapan, pemikiran orang secara orang ataupun kelompok.⁸ Tipe riset evaluasi implementasi dalam bentuk kualitatif deskriptif digunakan dalam riset ini untuk menggambarkan, menganalisa serta

⁶ Merdeka.com,Berjudul Siswi Hamil dan Putus Sekolah Terus Meningkat di Kota Mojokerto, Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2022

⁷ Komapas.com., berjudul “Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun,idunduh pada tanggal 11 September 2022

⁸ 12Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. 3 (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 60

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

menginterpretasikan keadaan-keadaan bersumber pada informasi yang penulis bisa gali secara lebih mendalam. Hingga saat ini yakni sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 implementasi kebijakan tersebut telah berjalan selama kurun waktu sepuluh tahun. Untuk mengetahui efektivitas implementasinya maka perlu dilakukan evaluasi, dengan harapan hasil evaluasi bisa dijadikan pemetaan dalam rangka Pemerintah Daerah menyusun strategi tindaklanjut berikutnya .

B. Kajian Pustaka

a. Pengertian Evaluasi Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati posisi yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997 : 59) dengan tegas menyatakan bahwa: “The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented.” (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Edward III (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: “*Policy implementation, ...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects*”. Sedangkan Grindle (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: “*implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*”. Dengan pengertian tersebut dapat memberi gambaran bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Artinya kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai sebuah aksi yang dilakukan oleh actor politik sebagai strategi untuk mengatasi masalah publik dengan mempertimbangkan hambatan dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Alur pembuatan kebijakan publik dimulai dari adanya isu kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Nugroho (2009: 145) menambahkan bahwa kegiatan setelah evaluasi kebijakan diperlukan lagi

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

revisi kebijakan untuk merumuskan kembali kebijakan. Tahap implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Kebijakan yang sudah terencana dengan sempurna bila kurang bagus proses implementasinya oleh para pelaksana maka kebijakan itu akan menemui kegagalan. Wahab (2015: 132-133) menjelaskan bahwa menurut sudut pandang teori siklikal (*Cyclical Theory*) implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan dalam proses kebijakan berupa bentuk produk hukum, dan aktivitas lanjutan sesudah diberlakukannya produk hukum tersebut. Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan saling kerja sama antar pemerintah dengan pihak lain { instansi lain, masyarakat / swasta } untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang diartikan sebagai “perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan”. Biasanya *implementation gap* ini terlihat dan sering dirasakan pada level bawah (Nakagaki, 2013:1). Penyebab adanya *implementation gap* dapat berasal dari faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mengatasi *implementation gap* dibutuhkan pendekatan yang berfokus pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran (masyarakat). Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi *implementation gap* ini. George Edward III (1980) menyatakan bahwa jika implementasi kebijakan public kurang diberi perhatian, maka implementasi tidak efektif sehingga kebijakan itu tidak akan berhasil dijalankan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan perlu diperhatikan empat hal, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jadi evaluasi implementasi kebijakan bisa diartikan sebagai penilaian atas aksi.tindakan ,maupun kinerja implementor dalam melaksanakan kebijakan apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan. Sebagaimana pendapat Terry (2013) bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.⁹

⁹ [Katadata.co.id](https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/633383e910a44/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-karakteristiknya) dengan judul "Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Karakteristiknya", <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/633383e910a44/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-karakteristiknya>

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi, antara lain model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu 1) Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor di luar peraturan. (Wibowo dkk, 1994: 25)

Karakteristik masalah berkaitan dengan mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Semakin mudah suatu masalah digarap dan dikendalikan maka akan diharapkan dengan mudah tercapai efektivitas dalam implementasinya. Struktur manajemen program tercermin dalam kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. Sementara itu sejumlah variabel diluar peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, antara lain: 1) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, 2) Dukungan publik, 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, 4) Dukungan dari pejabat atasan, 5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. Pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini menganggap bahwa suatu Implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis).

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP } di Kota Blitar*

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Komunikasi. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi tentang kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan (*implementor*) (Widodo, 2011:97). Tahap implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Kebijakan yang sudah terencana sehingga dapat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi berjalan lancar dan efektif. Faktor-faktor yang penting dalam penyampaian informasi, adalah transmisi (cara penyampaian), *clarity* (kejelasan informasi), dan *consistency* (konsistensi informasi). Islam memandang penting media komunikasi dalam penyampain informasi, maksud dan suatu tujuan.

Firman Allah dalam surah ali imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَنَاصَرُ لَهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ فَ
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal

Sumber Daya. Sumber daya berkaitan dengan ada tidaknya sumber daya pendukung, khususnya kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Widodo (2011:98) menyebutkan bahwa walaupun aturan yang dibuat sudah jelas dan akurat, namun implementasi tidak akan efektif jika sumber daya

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP } di Kota Blitar*

pelaksana kebijakan kurang bertanggung-jawab dalam melaksanakan kebijakan yang bersangkutan. Potensi sumber daya yang tinggi akan membuat implementasi berjalan dengan baik, sebaliknya, rendahnya potensi sumber daya akan menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.

Sebagaimana Allah Berfirman dalam surat QS. Al-Mujadalah Ayat 11

- اللَّهُ يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَهُ الْحُكْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
اللَّهُ يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Dalam surat QS. Az-Zumar Ayat 9 disebutkan ;

- سَتَجِدُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادِهِ لَقَدْ نَعْبُدُ اللَّهَ مَا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وَإِجْرَارًا وَكَلِمَةً يَدْعُونَ هِيَ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ الْأُولَى وَكَانُوا يَكْفُرُونَ

(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

Disposisi. Edward (1980:89) mendefinisikan disposisi sebagai pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik. Kemauan dan dedikasi serta karakteristik para implementor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sangat penting untuk keberlangsungan implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Rasulullah Saw bersabda terkait komitmen tanggungjawab dan integritas dalam menjalankan sebuah Amanah :

رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

Hadis diatas menjelaskan bahwa pada hahekatnya setiap pribadi manusia adalah pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban apalagi diberi Amanah jabatan ataupun tugas yang tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Struktur birokrasi. Struktur birokrasi disini adalah semua instrumen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur. Terdapat dua aspek struktur organisasi ini, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme biasanya dibuat dalam *Standard Operational Procedure*(SOP) yang merupakan pedoman langkah-langkah berupa keseragaman pola dalam pelaksanaan implementasi kebijakan supaya tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan. Aspek penting lain dari struktur birokrasi adalah ada atau tidaknya fragmentasi atau perpecahan di kalangan birokrasi pelaksana kebijakan. Fragmentasi di lingkungan birokrasi pelaksana kebijakan akan membuat permasalahan dalam implementasi

QS. Ar-Ra'd Ayat 11

- *وَأَبِين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ لَهُ مَعْبُودًا مِّنْ مَا بَانْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ*

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat diatas mengisyaratkan tentang manajemen dan struktur yang tertata dan sistematis yang harus dipatuhi dalam rangka menuju tujuan yang telah ditetapkan. Para malaikat sebagai pelaku organisasi harus mengikuti taat dan patuh sesuai alur dan mekanismenya.

Dalam surat QS. Al Infithor Ayat 10-12 ;

(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)

“ Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs al-Infithar :10-12)

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

Ayat diatas menjadi motivasi bagi pemegang Amanah / tugas /jabatan agar senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik , benar dan professional dan akan dimintai pertanggung jawaban kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Ghatsiyah ayat : 25 – 26

٢٥-٢٦ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ (الغاشية: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (الغاشية

“Sungguh, kepada Kami lah mereka kembali, kemudian sesungguhnya (kewajiban) Kami lah membuat perhitungan atas mereka.”

b. Tes Kemampuan Agama

Tes kemampuan agama adakah tes kemampuan tentang pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada peserta didik di Kota Blitar, sesuai dengan ajaran agama yang dianut sebagai evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Agama¹⁰.

Tes Kemampuan Agama merupakan sebuah alternatif yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai pintu pembuka dalam upaya proses pembentukan kepribadian dan karakter anak yang kuat, berakhlak mulia dan berperilaku yang baik. Tahapan ini dilekatkan pada mekanisme persyaratan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru { PPDB { Sekolah Menengah Pertama { SMP } di Kota Blitar, agar lebih berkualitas. Program ini mengharapka adanya hasil pemetaan kompetensi agama peserta didik. Khusus yang beragama Islam parameter yang dilakukan adalah kemampuan baca alQur'an dengan baik dan benar. Jangka panjangnya peserta didik termotivasi untuk lebih giat belajar dan mendalami alQur'an bukan hanya membaca saja tapi lambat laun meningkat untuk memahami isi kandungan alQur'an dan goal orientednya peserta didik mau mengimplentasikan ajaran alQur'an dalam berperilaku sehari-hari. Melalui strategi implementasi kebijakan public diharapkan dapat mendorong tingkat kemampuan agama peserta didik.

c. Sekolah Menengah Pertama

¹⁰ Peraturan Walikota Blitar nomor 10 tahun 2018,hal.6

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

Merupakan jenjang pendidikan dasar setelah pada Pendidikan formal setelah lulus Sekolah Dasar/ yang sederajat dan ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas VII samapai kelas IX di Kota Blitar.¹¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Tes Kemampuan Agama tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 10 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Dalam Rangka Melengkapi Persyaratan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} Di Kota Blitar, menjadi dasar utama pelaksanaan kebijakan tes kemampuan agama bagi peserta didik kelas VI SD/MI di Kota Blitar. Hasil pengamatan dari hasil wawancara secara acak dengan Guru PAI di beberapa Sekolah Dasar terindikasi masih banyak peserta didik di Kota Blitar belum mampu membaca al Qur'an dengan kaidah tajwid yang benar, Para peserta didik ini kurang memiliki kompetensi agama karena beberapa alasan, seperti minimnya waktu pembelajaran agama yang hanya 3 jam tiap minggu, tidak ada waktu menambah kompetensinya di Madrasah Diniyah dan TPQ saat di rumah karena berbenturan dengan jadwal less, pengaruh lingkungan serta kurangnya dukungan dari para orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan agama putra putrinya.

a. Sumber Daya

Implementor kebijakan tes kemampuan agama dilakukan Dinas Pendidikan Kota Blitar , dengan SDM yang dimiliki 84 pegawai. Leading sector Tes Kemampuan Agama ada di Bidang Dikdasmen dengan kekuatan 13 pegawai. Bidang Dikdasmen ini mengelola 63 lembaga SD negeri / swasta dan 2.587 peserta didik dari kelas 6 Tahun ajaran 2021/2022.¹² Dari segi potensi kuantitas dan SDM sudah cukup memadai dalam melaksanakan kebijakan tes kemampuan agama dengan jumlah peserta didik kelas akhir sejumlah 2.587 tersebut, namun kendala yang dihadapi berkaitan dengan terjadinya mutasi kepegawaian menyebabkan sejumlah pegawai Dikdasmen terimbas rotasi mulai Kepala Bidang, para Kasi dan staff. Hal ini sedikit banyak menimbulkan kesulitan / kekurangfahaman dalam menterjemahkan tujuan dan mekanisme implementasi kebijakan.

b. Komunikasi

¹¹ Ibid, hal.7

¹² Wawancara dengan Kabid Tendik, pada tanggal 14 September 2022

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

Komunikasi dan koordinasi dilakukan Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dengan tahapan-tahapan berikut ; pertama, memulai komunikasi awal dengan lintas sectoral Kantor Kementerian Agama Kota Blitar pada awal pada 18 Februari 2022. Keterlibatan Kantor vertical ini karena fungsinya sebagai pembina Guru Agama dan kurikulumnya, serta melibatkan peserta didik MI kelas 6 yang keberadaan Lembaga ini di bawah naungan Kantor Kementerian Agama. *Kedua*, tanggal 4 Maret 2022 diadakan kegiatan Workshop penilaian tes kemampuan agama bagi para calon penguji untuk memberikan kesamaan pemahaman dan persepsi dalam hal standar penilaian. Hal ini untuk mendapatkan standar nilai yang obyektif dan terukur. *Ketiga*, Sosialisasi dalam bentuk surat kepada Kepala SD/MI sekota Blitar tertanggal 4 Maret 2022 agar menyiapkan peserta didiknya mengikuti tes kemampuan agama.¹³

c. Disposisi

Setelah melalui beberapa tahapan dan mekanisme Tes Kemampuan Agama dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 15 Maret 2022 pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Blitar. Penguji Tes Kemampuan Agama melibatkan Guru Agama masing-masing Lembaga, Dari Guru TPQ dan Madrasah Diniyah yang sudah lulus ujian penguji sehingga dianggap cukup kompeten melaksanakan tugas sebagai penguji.

d. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan kebijakan pendidikan harus didukung dengan adanya implementor yang kompeten dan kapabel yang dilihat dari jumlah dan latar belakang pendidikan serta keahlian yang memadai. Adapun 3 spesifikasi pendidikan pegawai pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

Sumber: Data Pegawai Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2021

Jumlah pegawai menurut Pendidikan Tahun 2022

SMA	3
D2	-

¹³ Jadwal Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama tahun 2022

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

D3	-
S1	8
S2	2
Jumlah	13

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) DI Kota Blitar Tahun 2022.

a. Sumber daya

Melihat potensi kuantitas data dan SDM tersebut sudah cukup memadai dalam melaksanakan kebijakan dan program-program Pemerintah. Hanya saja persoalannya pada pengalaman pelaksana kebijakan yang notabene masih baru semua semua dan masih taraf mempelajari program yang baru dipegang.

Program Tes kemampuan agama sudah berjalan sejak 2012 sempat terhenti di tengah jalan karena pandemic covid 19 dan tidak dilaksanakan pada tahun 2021 dengan alasan yang sama. Tahun 2022 diselenggarakan kembali namun dengan formasi dan alur yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dampak mutasi besar-besaran di Dikda berdampak dalam memahami dan menterjemahkan implementasi kebijakan tes kemampuan agama.

b. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan tes kemampuan agama , komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan media informasi (media massa). Namun, sebagian masyarakat masih memandang bahwa tes kemampuan agama adalah hanya formalitas belaka dan belum difahami makna esensinya oleh sebagian pihak khususnya peserta didik dan walimurid. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua murid. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik sekolah maupun Dinas Pendidikan terus memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang program tes kemampuan agama ini.

Pemahaman tes kemampuan agama antara Pemerintah, Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat harus sama. Berbagai informasi harus disampaikan kepada masyarakat sampai mereka jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bisa memahami landasan filosofinya . Bahwa sebenarnya goal

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

orientednya adalah para peserta didik termotivasi untuk belajar lebih giat mendalami alQur'an, mampu membaca dengan baik dan benar, memahami maksud kandungan ayat-ayat alQuran, mencintai dan membumikan alQur'an dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Didalam melakukan sosialisasi bisa berkolaborasi dengan instansi lain yang terkait misalnya Kementerian Agama selaku pembina Guru Agama dan pembina kurikulum agama.

c. Disposisi

Para personil pelaksana kebijakan memiliki tanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan tes kemampuan agama ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi, ST, M.M, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar:¹⁴

Dinas Pendidikan sudah berkomitmen karena itu merupakan tugas kami dan kami ini sangat berharap ada perubahan yang signifikan yaitu berkurangnya buta huruf alQur'an bagi yang muslim dan meningkatnya perilaku akhlak mulia bagi semua peserta didik dengan lebih memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

d. Struktur Birokrasi

Dinas Pendidikan memberlakukan SOP yang ditetapkan untuk menghindari miskomunikasi, konflik atau permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. Dengan SOP yang berlaku di Dinas Pendidikan, para implementor diharapkan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. SOP juga bermanfaat ketika tindakan yang diseragamkan menimbulkan fleksibilitas, dimana siapapun bisa dipindahkan ke bagian lain tanpa menemui kesulitan karena SOP sudah ditetapkan. Dalam rangka untuk memudahkan semua pihak pada Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan tanggal 15 September 2022

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

disusunlah juknis sebagai acuan, pedoman dan panduan.¹⁵Juknis memuat tujuan, sasaran, jadwal pelaksanaan.

Manusia sebagai sumber daya penggerak suatu lembaga pendidikan, terutama pendidikan Islam, harus mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang diilhami dari shifat al-anbiyaa' atau sifat-sifat para nabi dan Rasul. Sifat-sifat tersebut yaitu: shiddiq (benar, jujur), amanah (bertanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas), tabligh (komunikatif), dan fathanah (cerdas dan bijaksana). SDM pendidikan Islam yang berkualitas adalah SDM yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, fleksibel serta responsif terhadap perkembangan di berbagai bidang, terutama pendidikan. Allah memberi perbedaan orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan: "Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan". Dengan bekal ilmu pengetahuan tersebut, SDM diharapkan mampu mengantarkan lembaganya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

D. Kesimpulan

Program tes kemampuan agama merupakan kebijakan strategis dalam rangka percepatan visi dan misi Kota Blitar dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Blitar. Implementasi kebijakan program tes kemampuan agama di Kota Blitar ini dinilai baik namun perlu adanya evaluasi dari beberapa aspek untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang.

Aspek sumber daya sebenarnya sudah memadai dengan jumlah dan kualifikasinya namun belum sepenuhnya memahami alur dan capaian kegiatan yang akan dituju dikarenakan SDM yang ada baru semua bagian dari konsekwensi mutasi, penyegaran dan penataan staff.

Komunikasi merupakan aspek yang perlu ditingkatkan, ditandai dengan terlalu dekatnya persiapan dengan pelaksanaan. Komunikasi antar pelaksana kebijakan dan komunikasi kepada kelompok sasaran, dan kurang jelasnya informasi yang diterima,

¹⁵ Juknis tes kemampuan agama

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

juga komunikasi dengan lintas sector dalam hal ini Kantor Kementerian Agama yang terkesan terlalu mendadak.

Disposisi sudah terlaksana cukup baik namun ada baiknya jika pelaksana kegiatan berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama agar pelaksanaan dari awal lebih tertata, tertib dan sistematis.

Struktur birokrasi sudah baik dilihat dari adanya panduan (SOP) dari Dinas Pendidikan selaku implementor, dan sudah ada Juknis tentang tes kemampuan agama sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan.

Judul Artikel: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} di Kota Blitar*

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, Prof., Dr., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Moleong, Lexi J., Dr. MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Marzuki, *Methodologi Research*, BPFEE-UII, Jogjakarta, 1989
- Muh. Uzer Usman, Drs, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996
- Muhammad Ali, *Penelitian Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1987
- Rahim, Husni, Dr, *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Logos, 2001.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi, 2011, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.